

Bappebti Blokir 109 Situs Perdagangan Berjangka Bodong Pada Juni 2021, Ini Daftarnya

Tanggal : Jum'at , 23 Juli 2021
 Media : Kompas.com
 Halaman : -
 Wartawan : Elsa Catriana
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Indrasari Wisnu Wardhana. *(Kepala Bappebti)*
 Rubrik : money
 Topik : Blokir Situs Ilegal

Bappebti Blokir 109 Situs Perdagangan Berjangka Bodong pada Juni 2021, Ini Daftarnya

Kompas.com - 23/07/2021, 06:35 WIB



Ilustrasi piang saham. Bagi investor reksadana, tentu tak asing lagi dengan bank kustodian. Apa itu bank kustodian? Bank kustodian adalah bank umum penampung dana investor. [@bankreksadana](#)

Penulis: Elsa Catriana | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada Juni 2021 telah memblokir 109 situs web di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) karena tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Dengan begitu, sejak Januari 2021 hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 622 situs web tanpa izin yang telah diblokir Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, sikap tegas ini akan terus dilakukan agar masyarakat terlindungi dan mendapatkan pelayanan secara legal dari transaksi perdagangan berjangka komoditi.

Baca juga: [Daftar 13 Pedagang dan 229 Aset Kripto Terdaftar di Bappebti](#)

"Setiap pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, semua penawaran di bidang perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," kata Wisnu dalam siaran resminya dikutip Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Menurut Wisnu, Bappebti akan terus melakukan pemblokiran termasuk kepada situs-situs broker luar negeri yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Selain itu pemerintah juga akan terus melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia serta pelaku usaha di bidang PBK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
[Daftarkan email](#)

Bappebti juga secara rutin akan melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang PBK tanpa memiliki perizinan dari Bappebti.

Hal ini, kata Wisnu, dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Baca juga: [Bappebti: Aset Kripto Bukan Alat Pembayaran](#)

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M Syist mengungkapkan, secara garis besar, modus penawaran investasi itu berkedok investasi di bidang PBK dan penawaran kontrak berjangka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

Masyarakat dilimbau agar tidak mudah percaya dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko.

Perdagangan berjangka dapat memberikan keuntungan yang tinggi, tetapi juga dapat menderita kerugian yang sangat besar atau *high risk high return*.

Oleh sebab itu masyarakat diminta tidak mudah tergur iming-iming pendapatan tetap (*fixed income*) maupun pembagian keuntungan (*profit sharing*) dalam investasi PBK.

"Jangan mudah menyetorkan dana ke rekening tertentu dengan janji akan memperoleh keuntungan dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu dana tersebut tidak ditarik oleh nasabah. Apalagi penawaran tersebut dibumbui dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan," ungkap Syist.

Baca juga: [Tinggal Tunggu Persetujuan Bappebti, Bursa Aset Kripto Indonesia Segera Hadi?](#)

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah tergur dengan janji keuntungan di luar kewajiban serta mempelajari terlebih dahulu mekanisme transaksi, untung, dan ruginya.

Berikut adalah daftar domain situs entitas yang melakukan kegiatan PBK tanpa perizinan Bappebti yang diblokir pada Juni 2021:

